

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)

ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT READINESS IN APPLYING THE GOVERNMENT ACCRUAL ACCOUNTING STANDARDS (Case Study in Jember District Government)

Abdul Fatah Cahya Purnama
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: afatah1803@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Jember) dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kendala yang dihadapi dalam persiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara. Obyek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jember. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dilihat dari parameter komitmen adalah kategori siap, dari parameter SDM adalah kategori tidak siap, dari parameter sarana dan prasarana adalah kategori tidak siap, dan dari parameter sistem informasi adalah kategori siap.

Kata kunci: Basis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kesiapan, Komitmen, SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi.

Abstract

This study aims to identify and analyze the readiness of local government (Government of Jember Regency) in implementing accrual-based government accounting standards and obstacles encountered in the preparation of accrual-based SAP implementation. This research is a qualitative descriptive study, using primary data in the form of interviews. Object of this study was working units (SKPD) Jember District Government. Data analysis methods used in this study is a qualitative analysis using descriptive approach, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion / verification. Jember Regency Government readiness is indicated by the commitment, human resources, infrastructure and information systems can be concluded that the Government of Jember seen from the parameter commitment is prepared categories, from Human Resources parameter is not prepared categories, from the parameters of infrastructure is not ready category, and from parameter information system is ready category.

Keywords: Accrual Basis, Government Accounting Standards, Readiness, Commitment, Human Resources, Infrastructure, Information Systems.

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-

undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international best practices. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management). Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamankan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamankan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali

seluruh aturan yang ada pada PP nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit. Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berbasis kas, sementara aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berbasis akrual.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak. Salah satu faktor yang mempengaruhi

kesiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia .

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya BPKAD (Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Pendukung yang akan membantu BPKD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kabupaten Jember wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sistem informasi untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Pemilihan obyek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Jember karena pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan sorotan dalam laporan keuangan APBD tahun anggaran 2013 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hasil audit BPK laporan keuangan tahun anggaran 2013 menurun dibandingkan laporan keuangan tahun anggaran 2012 yang mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember (Edy Budi Susilo), seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) harus melakukan koreksi terhadap pengelolaan keuangan di

masing-masing unit kerja dan menindaklanjuti temuan BPK terkait dengan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Jember tahun anggaran 2013.

Pentahapan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep yang diberikan oleh KSAP per tiap tahun dari program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual? (b) Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian dekriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Dengan demikian diharapkan fenomena tentang kesiapan Pemda dalam implementasi SAP, kendala-kendala yang dihadapi di daerah dapat dideskripsikan secara gamblang untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jember.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui wawancara.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang berlangsungnya proses penelitian dengan cara : (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data (*display data*), dan (d) kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam teknik triangulasi sumber ini, peneliti membandingkan dan mengecek validasi data yang diperoleh melalui wawancara dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual yang dilihat dari parameter komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. (a) *Parameter komitmen*, dalam penilaian parameter komitmen dikategorikan siap untuk penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa dari 40 SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember yang dijadikan obyek penelitian, seluruhnya menyatakan siap dalam penerapan SAP berbasis akrual. (b) *Parameter sumber daya manusia*, dalam penilaian parameter sumber daya manusia dikategorikan tidak siap. Dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual ini, ada 29 SKPD yang menyatakan siap dan 11 SKPD menyatakan belum siap. Ketidaksiapan SKPD

dalam menerapkan SAP berbasis akrual ini disebabkan karena pada bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualitas dalam jumlah yang cukup, serta penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan sehingga menyebabkan minimnya pemahaman tentang SAP berbasis akrual itu sendiri. (c) *Parameter Sarana dan Prasarana*, dalam penilaian parameter sarana dan prasarana dikategorikan tidak siap. Dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual ini, ada 33 SKPD yang menyatakan siap dan 7 SKPD yang menyatakan belum siap. Ketidaksiapan SKPD dalam penerapan SAP berbasis akrual ini disebabkan karena bagian keuangan belum memiliki sarana-dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban, serta belum adanya dukungan dari sistem informasi yang terintegrasi dan pengelolaan data transaksi masih dilakukan dengan cara manual. (d) *Parameter Sistem Informasi*, dalam penilaian parameter sistem informasi dikategorikan siap. Dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual ini, ada 37 SKPD yang menyatakan siap dan 3 SKPD yang menyatakan belum siap. Ketidaksiapan SKPD dalam penerapan SAP berbasis akrual ini disebabkan karena kurangnya dukungan sistem informasi manajemen yang mengakomodir pelaksanaan/penerapan SAP berbasis akrual, serta minimnya pemahaman tentang kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual.

Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, meliputi: (a) Bagian keuangan belum memiliki staff keuangan yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. (b) Penempatan pegawai bagian keuangan belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. (c) Minimnya pemahaman tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. (d) Bagian keuangan belum memiliki sarana yang cukup memadai dalam penerapan SAP berbasis akrual. (e) Pengelolaan data transaksi keuangan masih dilakukan secara manual. (f) Kebijakan dan prosedur akuntansi SAP berbasis akrual belum dipahami oleh seluruh pegawai keuangan.

Pembahasan

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan melihat parameter komitmen adalah kategori siap, parameter SDM adalah kategori tidak siap, parameter sarana dan prasarana adalah kategori tidak siap, serta parameter sistem informasi adalah kategori siap. Hal ini didasarkan pada penilaian kesiapan SKPD dari masing-masing parameter yang pada umumnya menyatakan siap, meskipun ada sebagian SKPD yang menyatakan belum siap karena beberapa faktor.

Penilaian kesiapan jika dilihat dari parameter komitmen secara keseluruhan menyatakan siap dari masing-masing SKPD. Hal ini dijelaskan pada hasil penelitian yang menunjukkan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan siap dalam penerapan SAP berbasis akrual berdasarkan pada parameter komitmen. Menurut hasil

wawancara dengan Didik Eko Pramono, SE. (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan) pada tanggal 10 September 2014, mengatakan:

“Komitmen itu sangat penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan faktor yang akan menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Jember.”

Penilaian kesiapan dari parameter sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai keuangan yang akan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dilandasi beberapa pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi yang akan mendukung keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Pentingnya sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan dijelaskan dengan hasil wawancara Kasubag Keuangan dan Akuntansi RSD. Dr. Soebandi Jember, Ribu Herlambang Widjajanto, SE. Pada tanggal 10 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual harus memperhatikan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai keuangan yang akan mengerjakannya, dan seharusnya pegawai keuangan yang mengerjakannya adalah pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai keuangan didukung dengan kesiapan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP nantinya.”

Akan tetapi pada kenyataannya dalam masing-masing SKPD masih banyak pegawai di bagian keuangan yang berpendidikan non akuntansi sehingga dapat menghambat pelaksanaan/penerapan SAP berbasis akrual secara maksimal. Pada kenyataannya masih ada 11 SKPD yang menyatakan belum siap dalam pelaksanaan/penerapan SAP berbasis akrual yang dilihat dari parameter SDM dengan berbagai kendala yang dihadapi. Kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman pegawai keuangan tentang SAP berbasis akrual yang disebabkan karena masih banyak pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Jember (SKPD) harus segera melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada saat ini. Penerapan SAP berbasis akrual yang harus dilakukan secara penuh pada tahun 2015, harus diimbangi dengan pemahaman SDM yang baik tentang SAP berbasis akrual. Jika tidak segera melakukan perbaikan kualitas SDM yang ada, Pemerintah Kabupaten Jember akan kesulitan untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban.

Sedangkan kesiapan sarana dan prasarana serta sistem informasi dalam penerapan SAP juga tidak kalah pentingnya mengingat parameter kesiapan sarana dan sistem informasi berkaitan dengan pelaksanaannya penerapan SAP nantinya. Sarana prasarana dan sistem informasi juga menjadi sorotan utama dalam persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Jember. Masih minimnya dukungan sarana penunjang penerapan SAP berbasis akrual ini, harus dapat segera diatasi dengan perbaikan dan pengembangan yang baik untuk menghasilkan optimalisasi penerapan SAP berbasis akrual secara penuh dan baik. Sarana prasarana sangat berperan penting dalam penerapan SAP berbasis akrual, dibutuhkan sarana yang lebih baik untuk penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban berdasarkan SAP berbasis akrual.

Pentingnya sarana dan prasarana penunjang serta sistem informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual dijelaskan dengan hasil wawancara dengan Bapak Pitoyo, SKM., Kepala Bagian Keuangan RSD. Balung Kabupaten Jember pada tanggal 12 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh dibutuhkan sarana prasarana dan sistem informasi yang lebih baik dan dapat menunjang segala aktivitas atas pelaksanaan SAP berbasis akrual. Melihat kondisi yang ada saat ini, masih banyak sarana dan prasarana yang harus diperbaiki atau dikembangkan untuk penerapan SAP berbasis akrual. Tanpa adanya dukungan dari sarana prasarana dan sistem informasi yang baik, pelaksanaan SAP berbasis akrual tidak dapat berjalan secara optimal.”

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesiapan dalam penerapan SAP, dalam rangka kesiapan implementasi SAP berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tersebut, masih terdapat beberapa kendala. Adanya kelemahan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka kesiapan implementasi SAP berbasis akrual secara penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, maka Kabupaten Jember perlu lebih fokus dan optimal dalam mengatasi kendala yang ada. Dengan kata lain, adalah peningkatan komitmen, kemauan dan integritas Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus melakukan pengembangan dan sosialisasi tentang pemahaman SAP berbasis akrual serta memperbaiki sarana prasarana dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan segala aktivitas atas pelaksanaan SAP dalam upaya mendukung optimalisasi bidang tugas pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Didik Eko Pramono, SE.(Kasubag Umum dan Keuangan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan) Kabupaten Jember pada tanggal 10 September 2014 menyatakan:

“Penerapan SAP ini di Pemerintah Kabupaten Jember tidak sepenuhnya mudah untuk diterapkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Banyak sekali kendala dan hambatan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan seperti masalah SDM,

sistemnya dan hambatan lain yang masih ada untuk menerapkan SAP berbasis akrual ini.”

Hasil yang ada sehubungan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena masih menunggu pedoman umum yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri, namun pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk melaksanakan dan memanfaatkan SAP dalam pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk transparansi tugas menuju good governance. (b) Sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, yang dijadikan pedoman dalam proses penyusunan LKPD adalah PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP Berbasis Akrual. Penuh yang sifatnya sementara dalam implementasinya sudah cukup memadai dijadikan sebagai pedoman penyusunan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (c) Jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, masih sebagian kecil saja yang memahami teknis SAP, dan secara kualitas mungkin masih sangat perlu ditingkatkan karena pada umumnya pemahaman pegawai mengenai akuntansi pemerintahan masih lemah dan pemahaman tentang penerapan basis akrual masih kurang. (d) Belum dibangunnya software untuk mengakomodir ketentuan PP No. 71 Tahun 2010. (e) Sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi terutama dimasing-masing SKPD, seperti perangkat lunak untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. (f) Pemerintah daerah kurang memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP

Pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Kemendagri bekerjasama dengan KSAP perlu rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan penerapan basis akrual. Kondisi di daerah khususnya di Kabupaten Jember saat ini adalah kurangnya pemahaman terkait PP tersebut, sehingga sosialisasi dan bimbingan teknis sangat diperlukan.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, LKPD Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2014 ini masih berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan PP No.71 Tahun 2010 yang akan dimulai pada tahun 2015 dengan meningkatkan pemahaman melalui keikutsertaan dalam sosialisasi PP tersebut, meskipun nara sumber berasal dari akademisi.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (a) Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan

komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dilihat dari parameter komitmen adalah kategori siap, dari parameter SDM adalah kategori tidak siap, dari parameter sarana dan prasarana adalah kategori tidak siap, dan dari parameter sistem informasi adalah kategori siap. (b) Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, Bagian keuangan belum memiliki staff berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, penempatan pegawai bagian keuangan belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, minimnya pemahaman PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, minimnya pelatihan/sosialisasi terkait dengan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrua, bagian keuangan belum memiliki sarana yang cukup memadai dalam penerapan SAP Berbasis Akrua, pengolahan data transaksi keuangan masih dilakukan secara manual (excel), kebijakan dan prosedur akuntansi SAP berbasis akrua belum dipahami oleh seluruh pegawai keuangan.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain: (a) Penilaian kesiapan pegawai akuntansi dalam pemerintahan hanya menggunakan persepsi, tidak dinilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya. Penilaian kesiapan tidak hanya diukur dari penilaian persepsi pegawai terhadap parameter tetapi juga didukung hasil implementasi atau evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pelaksanaan SAP. (b) Penelitian ini hanya mendeskripsikan tetapi tidak menjelaskan pengaruh dari masing-masing parameter terhadap kesiapan. Hendaknya diuji pengaruh parameter terhadap kesiapan SAP sehingga mampu melihat besar kontribusinya. (c) Wawancara dalam penelitian ini belum sepenuhnya dikembangkan terkait dengan indikator pada parameter yang digunakan. Pengembangan wawancara untuk mengupas indikator-indikator yang terdapat pada parameter kesiapan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrua.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Citra. 2011. *Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri. 2012. *Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi SAP berbasis Akrua secara Penuh berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua; Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung, Alfabeta.